BAB III TINJAUAN KAWASAN

3.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota di Indonesia yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota yang berada pada jalur lintasan antara Banjarmasin sebagai Ibukota Propinsi dengan Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Kabupaten di wilayah Banua Enam sampai ke Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tangah.

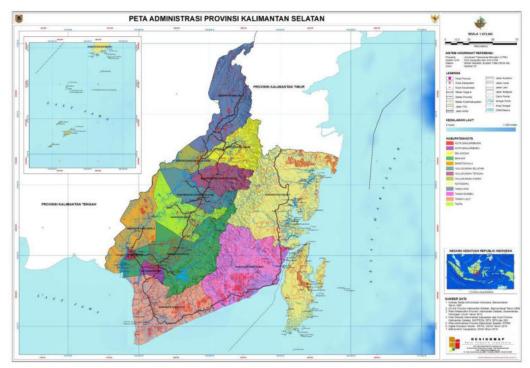
Berdasarkan data dari BMKG Banjarbaru, rata-rata suhu udara di tahun 2014 berkisar antara 21°C sampai dengan 37°C. Kelembaban udara relatif tinggi yaitu berkisar rata-rata antara 69% sampai 87%. Rata-rata curah hujan selama tahun 2014 tercatat mencapai 197,3 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan September (5 mm) dan tertinggi pada bulan Januari (443 mm).

Kota Banjarbaru memiliki letak astronomis antara 03° 22' 55" sampai dengan 03° 36' 22" Lintang Selatan serta 114° 40' 35" sampai dengan 114° 54' 51" Bujur Timur dengan luas wilayah 371,38 km2 atau 0,88% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru berjarak 38 Km ke arah utara dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan. Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang. Kecamatan terluas di Kota Banjarbaru yakni Kecamatan Cempaka dan yang tersempit adalah Kecamatan Banjarbaru Selatan. Kota Banjarbaru memiliki batas administrasi sebagai berikut:



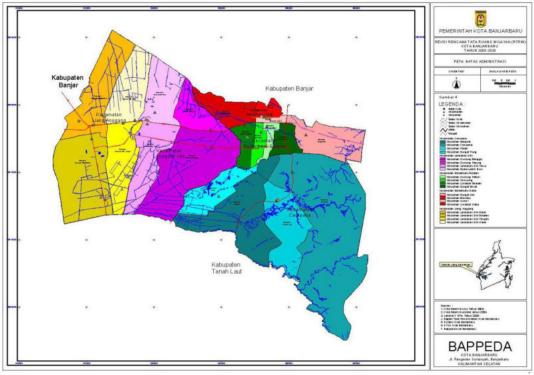
Gambar 3. 1 Peta Pulau Kalimantan

Sumber: https://gpswisataindonesia.info/2015/04/peta-batik-kalimantan/



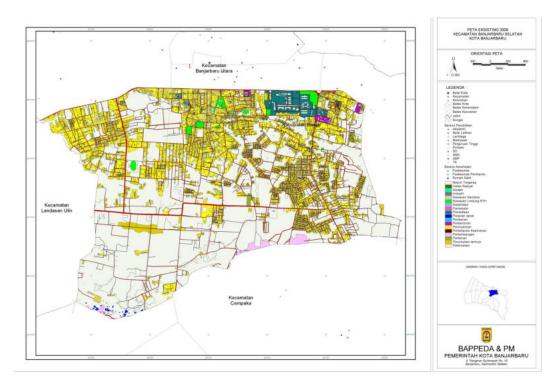
Gambar 3. 2 Peta Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: https://petatematikindo.wordpress.com/



Gambar 3. 3 Peta Kota Banjarbaru

Sumber: BAPPEDA & PM PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



Gambar 3. 4 Peta Kecamatan Banjarbaru Selatan

Sumber: BAPPEDA & PM PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Utara : Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

Selatan : Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah

Timur : Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar

Barat : Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

Statistik Geografi dan Iklim Banjarbaru				
Uraian	Satuan	2014		
(1)	(2)	(3)		
Luas Wilayah	km ²	371,38		
Kecepatan Angin	knot	3,3		
Kelembaban	%	82,7		
Jumlah Curah Hujan	mm	197,3		
Hari Hujan	hari	18		
Suhu Udara Rata-rata	°C	26,8		
- Maksimum	°C	22		
- Minimum	°C	34		

Gambar 3. 5 Statistik Geografi dan Iklim Banjarbaru

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, 2014

Kecamatan Banjarbaru Selatan terdiri dari 4 kelurahan, yaitu:

- 1. Guntung Paikat
- 2. Kemuning
- 3. Loktabat Selatan
- 4. Sungai Besar

Wilayah Banjarbaru sekarang, dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka.

Pada era tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif.

Nama banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang.

Sebagai kota administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya UU tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.

Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman serta Bandar Udara Syamsudin Noor maupun peruntukan yang lain.Gunung Apam termasuk wilayah Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

- 1951, Gubernur dr. Murdjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam menjadi Kota Banjarbaru sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan.
- 1953, pembangunan perkantoran dan pemukiman di Banjarbaru, dirancang oleh D.A.W. Van der Peijl.
- 9 Juli 1954, Gubernur K.R.T. Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, namun tidak ada realisasi.
- 27 Juli 1964, DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
- Oktober 1965, Panitia Penuntut Kotamadia Banjarbaru menuntut agar meningkatkan status Banjarbaru menjadi daerah tingkat II/kotapraja dan mendesak direalisirnya kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
- 12 Oktober 1965, DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
- 17 Agustus 1968, penetapan status Banjarbaru sebagai Kota Administratif.
- 27 April 1999, penetapan status Banjarbaru sebagai Kotamadya.



Gambar 3. 6 Peta Kecamatan Banjarbaru Selatan

Sumber : Google Maps

3.2 KONDISI PEREKONOMIAN

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasilhasil pembangunan di daerah dalam lingkup Kabupaten/Kota adalah jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun, atau disebut Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Dengan berjalannya otonomi daerah terjadi perubahan jumlah produksi dan harga barang/jasa yang merupakan faktor utama pendorong dalam kenaikkan/turunnya nilai PDRB.

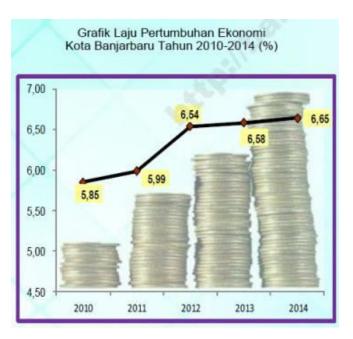
Tahun	PDRB atas dasar berlaku	PDRB atas dasar harga konstan	Pertumbuhan ekonomi	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2010	3.475.509	3.475.509	5,85	
2011	3.902.313	3.683.619	5,99	
2012	4.366.554	3.924.617	6,54	
2013")	4.951.498	4.182.998	6,58	
2014**)	5.822.747	4.461.020	6,65	

Gambar 3. 7 Tabel Perkembangan Ekonomi Kota Banjarbaru

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka, 2014

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB adhb atas dasar tahun 2010 Kota Banjarbaru, terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 3,48 Triliyun rupiah meningkat menjadi 5,82 Triliyun rupiah pada tahun 2014. PDRB adhb merupakan penghitungan PDRB sesuai harga pasar yang berlaku sehingga kenaikannya dipengaruhi faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa).

Sementara itu PDRB adhk atas dasar tahun 2010 pun menunjukkan kenaikan yang sama yaitu dari hanya 3,48 Triliyun rupiah pada tahun 2010 menjadi 4,46 triliyun rupiah pada tahun 2014. Peningkatan yang terjadi pada PDRB adhk inilah yang menjadi indikator penting perekonomian karena pada perhitungan ini faktor kenaikan harga sudah dihilangkan, dengan kata lain kenaikan pada perhitungan ini menunjukkan kenaikan produksi pada sektor-sektor ekonomi atau yang disebut juga pertumbuhan ekonomi atau PDRB riil.



Gambar 3. 8 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka, 2014

Perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65 % yang berarti produksi barang dan jasa yang dihasilkan naik

sebesar 6,65 % dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 6,58 %. Pencapaian tersebut turut didukung oleh pertumbuhan yang terjadi pada sektor penyusunnya.

Pada tahun 2010-2014 komposisi struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi oleh sektor tersier. Secara Umum ada 4 kategori yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB ADHB Kota Banjarbaru yaitu : Kategori Transportasi dan Pergudangan; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan keamanan; Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Kategori Konstruksi.

Sampai dengan tahun 2014 struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi oleh peranan kategori tersier dan kategori sekunder, ini karena Kota Banjarbaru merupakan wilayah perkotaan yang didominasi oleh wilayah permukiman dan perkantoran dan tidak memiliki SDA yang berlimpah.

PDRB perkapita Kota Banjarbaru semakin meningkat setiap tahunnya dari 17,27 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 25,57 juta rupiah pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 10,35 % setiap tahunnya. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita kota Banjarbaru masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah. Dari sisi PDRB perkapita konstan.



Gambar 3. 9 Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka, 2014

3.3 KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

A. Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang umum digunakan adalah perkembangan jumlah penduduk miskin atau jumlah keluarga miskin. Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Banjarbaru sebagaimana dapat dilihat pada table 1.21 menunjukkan pada tahun 2011 terdapat sebanyak 4.641 Keluarga miskin yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru.

Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2011

		Jumlah			
No.	Kecamatan	RT	RW	Penduduk Miskin (KK)	
1	Landasan Ulin	147	29	1,318	
2	Liang Anggang	71	15	972	
3	Cempaka	103	30	993	
4	Banjarbaru Utara	125	27	640	
5	Banjarbaru Selatan	128	23	718	
т	TAL KESELURUHAN	574	124	4,641	

Gambar 3. 10 Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan

Sumber: BPMPKB Kota Banjarbaru 2011

B. Perumahan

Jumlah Rumah Per-Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumla	Jumlah		
140	Recamatan	Penduduk (Jiwa)	KK (2010)	Rumah	
1	Landasan Ulin	52.428	14.432	16.540	
2	Liang Anggang	35.201	8.935	9.759	
3	Cempaka	28.854	7.485	7.313	
4	Banjarbaru Utara	43.614	12.999	13.254	
3	Banjarbaru Selatan	43.247	13.092	12.344	
	Total	203.398	56.943	59.210	

Gambar 3. 11 Jumlah Rumah Per-Kecamatan

Sumber : BPS, 2011

Kawasan kumuh di Kota Banjarbaru tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan total area mencapai 561,32 Ha. Berdasarkan tipologinya, kawasan kumuh ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kumuh berat seluas 349,12 Ha (terdapat di Kecamatan Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka), kumuh sedang pada area seluas 86,68 Ha dan kumuh ringan seluas 125,52 Ha.

3.4 SARANA DAN PRASARANA

A. Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM adalah dengan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Kota Banjarbaru cukup lengkap. Fasilitas pendidikan yang meliputi semua jenjang mulai dari TK, SD, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri. Berikut ini adalah jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di kota Banjarbaru

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	6	139	145
SD/MI	67	22	89
SMP/MTs	14	19	33
SMA/MA	5	12	17
SMK	5	10	15
PT	2	10	12

Gambar 3. 9 Tabel Jumlah Sekolah di Kota Banjarbaru

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, 2014

B. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Banjarbaru dapat dikatakan cukup baik sebab ada penambahan jumlah fasilitas kesehatan, hal ini sebanding dengan pertumbuhan

jumlah penduduk Kota Banjarbaru, sehingga kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan dapat terpenuhi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2014 ini terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Banjarbaru yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014
Rumah Sakit (RS)	4	4	5	6	6
Puskesmas	8	8	8	8	8
Puskesmas Pembantu	13	12	13	14	14
	13	12	13	14	

Gambar 3. 10 Tabel Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarbaru

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2010

C. Drainase

Sebagian besar drainase di kota Banjarbaru bermasalah, keadaan ini diperparah karena ada beberapa sungai yang mati, pembangunan perumahan baru/jalan yang tidak mempunyai saluran drainase dan tidak adanya koneksitas antar blok perumahan. Hal ini menyebabkan air terperangkap pada blok-blok perumahan sehingga tidak terjadi sirkulasi (aliran) air dari areal genangan ke drainase/sungai.

D. Persampahan

Kota Banjarbaru seiring dengan perkembangan kota dan pertambahan penduduknya, maka tidak terlepas dengan persampahan, sehingga pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru perlu ditata ulang, Pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce-Reuse-Recycling) harus lebih ditingkatkan di Kota Banjarbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, mengharapkan bahwa tingkat pelayanan persampahan mendapatkan

pelayanan tinggi, daur ulang dan pengomposan lebih mendominasi, operasi open dumping mulai ditinggalkan dan diganti dengan Sanitary Landfill

E. Limbah Domestik

Limbah dapur pada umumnya disalurkan melalui drainase terbuka sedangkan limbah kamar mandi, sebagian masih dibuang langsung ke badan air dan sebagian sudah menggunakan septic tank. Hanya saja konstruksi septic tank pada bagian dasarnya tidak kedap air, sehingga bakteri yang ditimbulkan menyebar ke badan air/genangan. Pemasangan pipa langsung dari septic tank ke IPAL komunal sudah mulai diterapkan pada lokasi-lokasi terbatas dengan cakupan kurang dari 1%.